

## SEJARAH MUHAMMADIYAH DI POSO DAN DONGGALA

**Haliadi**

[haliadisadi@gmail.com](mailto:haliadisadi@gmail.com) (corespondensi)

Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Tadulako

### Abstrak

Perkembangan Islam di Sulawesi Tengah di paruh awal Abad ke-20 semakin berkembang karena hadir dalam bentuk Organisasi Sosial-Politik Islam seperti munculnya Organisasi Al Khairat dan Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki sejarah yang unik karena tumbuh secara sporadis seperti di Luwuk, Poso, Bungku, Donggala, Togean, dan Toli-Toli. Artikel ini memilih persoalan bagaimana proses berdirinya Organisasi Muhammadiyah di Poso dan Donggala? Dengan demikian, tujuan artikel ini adalah menguraikan tokoh dan tahun berdirinya Muhammadiyah di Wilayah Poso dan di wilayah Donggala. Artikel ini menggunakan metodologi sejarah dengan bahan dokumen arsip Belanda dan oral history untuk mengungkap fakta. Semua sumber dan fakta yang terbentuk akan dianalisis dengan teori aktor dan teori kausalitas untuk mendapatkan pembahasan yang memadai. Berdasarkan alat analisis tersebut, artikel hasil penelitian ini menemukan bahwa Muhammadiyah di Poso didirikan oleh Tom Oli'i, Ismail Baga (keduanya orang Gorontalo), dan Raden Himam dari Yogyakarta pada tahun 1935, sementara Muhammadiyah di Donggala didirikan M. Junus Anis, K. H. Abdullah kemudian HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amarullah) sejak tahun 1928 dan diresmikan pada tahun 1932.

Kata Kunci: Muhammadiyah, Poso, dan Donggala.

### PENDAHULUAN

Universitas Alkhairat dan Universitas Muhammadiyah di Kota Palu adalah bukti monumental adanya lembaga pendidikan tinggi yang dibangun oleh organisasi sosial Agama Islam yang besar di Sulawesi Tengah yakni Organisasi Alkhairat dan organisasi Muhammadiyah (Haliadi dan Syamsuri, 2015). Khusus Perkembangan Ormas Islam Muhammadiyah di Sulawesi Tengah memiliki sejarah panjang di Sulawesi Tengah, yakni periode awal di tahun 1930-an, kemudian berkembang di tahun 1960-an oleh Rusdi Toana dan kawan-kawan hingga akhirnya berdiri Universitas Muhammadiyah Palu Sulawesi Tengah. Akhirnya, Organisasi Muhammadiyah semakin berkembang dan membuka Perguruan Tinggi pada tanggal 1 Agustus 1973 di Palu yang bernama Universitas Muhammadiyah dan awalnya membina dua Fakultas yakni Fakultas Ilmu Agama dan Da'wah (FIAD) dan Fakultas Ilmu Pendidikan (FID). Hingga tahun 1974/1975 Muhammadiyah Palu telah memiliki 154 orang mahasiswa dengan 17 orang Dosen. Hal ini sejalan dengan memori Gubernur Sulawesi Tengah bahwa:

“perkembangan organisasi Muhammadiyah di Sulawesi Tengah sebenarnya merupakan organisasi yang telah lama berdiri dan mempunyai pengaruh yang cukup besar di kalangan masyarakat dan telah mempunyai cabang-cabang di Kabupaten dan kecamatan-kecamatan.

Dilihat dari prospek perkembangannya untuk masa mendatang tetap mempunyai

pengaruh di Kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda Islam.”( *Memory pj.Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah Eddy Djandjang Djajaatmadja* (Palu: Pemda Tk.1 Sulteng, 1979: 36)

Adanya tokoh pendiri dalam organisasi Muhammadiyah di Poso dan Donggala memberikan gambaran relevansi penerapan teori tokoh atau aktor dalam artikel ini. Muhammadiyah di Poso didirikan oleh Tom Oli'i, Ismail Baga (keduanya orang Gorontalo), dan Raden Himam dari Yogyakarta pada tahun 1935, sementara Muhammadiyah di Donggala didirikan M. Junus Anis, K. H. Abdullah kemudian HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amarullah) sejak tahun 1928 dan diresmikan pada tahun 1932 (Politiek Verslag van Residen Manado over het tweede halfjaar 1932, Bundel MvO 4e, Koleksi ANRI Jakarta). Persebaran pendirian ini bukan hanya di dua tempat tersebut tetapi Muhammadiyah juga sudah mulai berdiri di wilayah Luwuk termasuk di Lobu. *Diniyah School* di Lobu yang dipimpin oleh Hadi Adaba dari Jawa. Pada tahun 1935 organisasi Muhammadiyah membangun *Diniyah School* di Luwuk dipimpin oleh Ngadimin, dibangun di Balantak dipimpin oleh Soetohardjo, dan dibangun juga *Diniyah School* di Tangeban dipimpin oleh Baihaqi. Demikian juga di Bungku, masalah H. Abdulrahim mengenai pertemuan dan Masjid tidak dilaporkan kepada Penguasa di Bungku Abd. Razak. Pada tahun 1936, Adiknya yang bernama Intje Abdullah atau Abdullah Matjan dipenjara oleh penguasa dengan tuduhan tuntutan palsu terhadap penguasa pribumi. Dilanjutkan Tanggal 24 April 1938, mengadakan rapat umum di Ampana yang dipimpin oleh wakil Pengurus Pusat Muhammadiyah Sulut, Achmad Doenggio, dihadiri 300-an orang. Membicarakan tujuan dan perjuangan Muhammadiyah. Hingga tahun ini guru Muhammadiyah sebanyak 50 orang Guru. Juni 1938, permohonan membangun sekolah di Salabangka anggotanya sebanyak 128 orang saja.

Studi literatur awal adalah buku-buku dan artikel ilmiah tentang Muhammadiyah di Sulawesi Tengah. Karya-karya tersebut antara lain: Sutrisno Kutoyo, dkk. yang berjudul: *Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Tengah*; Sutrisno Kutoyo yang berjudul: *Sejarah Daerah Sulawesi Tengah*; Syakir Mahid dkk. yang berjudul: *Sejarah Sosial Sulawesi Tengah*; Syamsuddin H. Chalid yang berjudul “*Sejarah Perkembangan Muhammadiyah di Sulawesi Tengah*.” Literatur awal ini memberikan inspirasi positif awal untuk mendalami Muhammadiyah di Sulawesi Tengah. Selain beberapa literatur yang telah disebutkan ada juga arsip-arsip sebagai sumber primer yang mendukung penelitian ini berupa: *Koloniaal Verslag Celebes en Onderhoorigheden over het jaar 1932*, *Koloniaal Verslag Celebes en Onderhoorigheden over het jaar 1915*, *Memorie van Overgave B.J. van den Berg* Januari 1936, *Regeering Almanak* Deel II, tahun 1905-1939, *Staatsblad van Nederlandsch Indië* tahun 1835 nomor 37, *Politiek Verslag van Residen Manado over het tweede halfjaar 1932*. Sumber-sumber primer akan memberikan informasi tentang keakuratan sumber data dan orisinalitas serta kebaruan sebagai temuan dalam penelitian ini.

Menurut sumber sekunder buku karya Nurhayati Nainggolan bahwa *Diniyah School* di Pagimana dikembangkan oleh guru-gurunya Basir Ma'sum, Abdullah Siraj, Raden Himam, Muzamil, K. Dunga, Harun Dahlan. Keenam guru di Pagimana ini merupakan tamatan Muallimin Muhammadiyah dari Yogyakarta. Sedangkan, HIS Muhammadiyah di Luwuk dikembangkan oleh Sirajuddin Datuk Adam, Otoluwa, Oe. H. Baluati, Ngadimin, dan Satibi. Selanjutnya, *Diniyah School* di Bualemo dipimpin oleh Soekardi seorang tamatan *Muallimin* Yogyakarta. Sekolah- selokah Muhammadiyah berkembang dan membangun *Diniyah School* di Lobu yang dipimpin oleh Hadi Adaba dari Jawa. Pada tahun 1935 organisasi Muhammadiyah membangun *Diniyah School* di Luwuk dipimpin oleh Ngadimin, dibangun di Balantak dipimpin oleh Soetohardjo, dan dibangun juga *Diniyah School* di Tangeban

dipimpin oleh Baihaqi (Nurhayati Nainggolan, 1986/1987: 87-88).

Kajian serupa dengan kajian ini antara lain: tulisan Herman DM yang berjudul “Sejarah Pesantren di Indonesia,” (Herman, DM, 2013: 145-158) yang menjelaskan tentang perkembangan pesantren sebagai lembaga pendidikan sekaligus lembaga sosial Islam di Indonesia. Salah satu kelebihan tulisan ini adalah mampu menjelaskan dua contoh sistem lembaga pendidikan Islam di Indonesia yakni bentuk, yakni Ampel dan Gontor. Penjelasan mengenai sistem dan metode pesantren di Indonesia dapat dibagi menjadi dua priode; pertama, Ampel (salafi) yang mencerminkan kesederhanaan secara komprehensif. Kedua, priode Gontor yang mencerminkan kemoderenan dalam sistem metode dan fisik bangunan, sehingga pada hakikatnya pesantren memiliki tiga unsur yakni; santri, kiyai dan asrama (Herman, DM, 2013: 145-158). Namun, tulisan ini masih memiliki kelemahan yakni terlalu normatif sekali belum menjelaskan sebab akibat dari peristiwa yang satu dengan yang lain menjadi satu kesatuan analisis yang jelas. Berdasarkan beberapa argumentasi tersebut, artikel ini memilih persoalan yang berfokus pada: bagaimana proses berdirinya Organisasi Muhammadiyah di Poso dan Donggala? Pertanyaan ini mengarahkan penulis untuk menguraikan dan menganalisis sejarah berdirinya Muhammadiyah di Poso dan Donggala.

## **TINJAUAN TEORETIS**

Ada dua teori yang digunakan dalam artikel ini yakni Teori Aktor untuk membahas tokoh pendiri Muhammadiyah dan Teori Kausalitas untuk mencari tahu sebab akibat berdirinya Muhammadiyah di Poso dan Donggala.

### **1. Teori Aktor**

Teori aktor diprakarsai oleh Bruno Latour pada awal 1980-an bersama Michel Callon di cole des Mines di Paris. Teori ini disebut *Actor Network Theory* (ANT) selanjutnya berkembang pesat juga di Inggris melalui upaya John Law dan kawan-kawan. Teori ini lahir dari pertemuan antara techno dengan sains. Hal itu sebagai akibat dari bidang interdisipliner studi sains dan teknologi. Anggapan dasarnya adalah dapat membatalkan semua Kesenjangan Besar yang terakhir: agensi/struktur, mikro/makro, subjek/objek, dan budaya/alam. Menurut ANT, setiap aktan memperoleh identitasnya dari hubungan yang dimasukinya dan di dalamnya ditetapkan. “jaringan” menunjuk setiap asosiasi atau kumpulan elemen manusia dan nonmanusia yang heterogen (Latour, Bruno, 1987). Berdasarkan kerangka ini, artikel yang berjudul Sejarah Muhammadiyah di Poso dan Donggala ini mencoba mengulik aktor Muhammadiyah dan jaringan yang dibangunnya di Sulawesi Tengah.

### **2. Teori Kausalitas**

Setiap kejadian sudah pasti memiliki penyebabnya karena sesuatu tidak mungkin terjadi begitu saja dan sudah pasti kejadian itu sudah menjadi penyebab kejadian lainnya. Persoalan sebab dan akibat biasa disebut dengan istilah *causalitas*, yang berasal dari kata “*causa*” yang berarti sebab. Pada ilmu sejarah, teori *causalitas* biasanya bertujuan memberikan jawaban atas pertanyaan kapan suatu kejadian dianggap sebagai suatu sebab dan akibat atau ajaran *causalitas* bertujuan untuk mencari hubungan sebab dan akibat, dalam arti bahwa sejauhmana akibat tersebut ditentukan oleh sebab. Oleh karena itu, setiap kejadian sejarah sudah pasti memiliki rangkaian penyebab-penyebab yang unik untuk dijelaskan berdasarkan fakta-fakta sejarah yang ada. Dengan demikian, teori memberikan argumentasi bahwa setiap peristiwa adalah sebab, dan semua peristiwa itu nilainya sama, sebab kalau satu

peristiwa itu tidak ada maka akibatnya akan berbeda pula (Martin Prodjohamidjojo, 1997: 32).

## METODOLOGI PENELITIAN

Pengertian tentang metodologi terdapat dua hal, yakni *pertama*, sebagai metode dalam arti cara (bekerjanya penelitian). *Kedua*, sebagai ilmu tentang metode yang dimaknai sebagai pendekatan (sudut pandang). Penelitian ini menggunakan metode sejarah sebagai bekerjanya penelitian untuk artikel ini, sedangkan sebagai pendekatan menggunakan antropologi terutama teori aktor.

Penelitian yang menghasilkan artikel ini dirancang dalam 4 tahap, yakni: tahap **pertama**, mencari dan menemukan sumber-sumber laporan kolonial Belanda tentang gerakan social terutama arsip tentang Muhammadiyah. Arsip dan dokumen primer merupakan bahan utama bagi penelitian sejarawan tidak hanya berupa teks tertulis, tetapi juga dokumen yang terekam dalam ingatan kolektif masyarakat. Sejarah lisan dan tradisi lisan turut menyumbangkan sumber penting adanya Muhammadiyah di Poso dan Donggala (Jan Vansina, 1965: 1).

Tahap **kedua**, adalah tahap kritik sumber yaitu semua sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder termasuk sumber lisan dilakukan kritik intern dan kritik ekstern untuk mendapatkan tingkat otentisitas dan validitasnya data. Selanjutnya, tahap **ketiga** yaitu tahap interpretasi untuk mendapatkan makna dari semua fakta yang telah ditemukan. Akhirnya, tahap **keempat** historiografi yakni tahap penulisan laporan dalam bentuk artikel ilmiah ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. MUHAMMADIYAH POSO

Jumlah penduduk yang memeluk agama Islam merupakan bagian masyarakat yang mendukung perkembangan Muhammadiyah di Kota ini sejak tahun 1935-1996. Muhammadiyah di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Poso masuk dann terbentuk pada tahun 1935 (Haliadi, 2016: 1-6). Organisasi keagamaan yang bercorak modern ini di Kota Poso didirikan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah yang berasal dari Gorontalo, seperti Tom Oli'i, Ismail Baga (keduanya orang Gorontalo), dan Raden Himam dari Yogyakarta. Kedatangan dan pendirian Muhammadiyah di Kota Poso (Mahfud M. Gamar, 1997: 24) tidak terlepas dari keadaan Umat Islam saat itu. Kondisi masyarakat Islam Poso sebelum berdirinya Muhammadiyah mengalami keterbelakangan dalam berbagai bidang antara lain bidang pendidikan, ekonomi, maupun pemahaman dan pelaksanaan ajaran Islam, bahkan kehidupan ritual masa pra-Islam masih hidup di tengah-tengah masyarakat Kota Kolonial tersebut. Keadaan inilah yang mendorong didirikannya Muhammadiyah di Kota Poso (Mahfud M. Gamar, 1997: 24); (Haliadi, 2016: 1-6).

Dalam upaya pengembangan Muhammadiyah di Kota Poso (Poso Kota) tidak hanya dilakukan oleh tiga orang tokoh Muhammadiyah dari Gorontalo dan Yogyakarta melainkan adanya campur tangan tokoh-tokoh lokal yang bersifat individu maupun keluarga. Mereka itu antara lain: Keluarga Lasahido, dan Keluarga Lapatindo, serta Mangun Pakaya, dan Yusuf Lapatindo. Mereka merupakan keluarga orang-orang terpandang dan berpengaruh, sehingga di tangan merekalah roda organisasi Muhammadiyah Kota Poso bergerak dan berkembang.

Muhammadiyah cabang Poso didirikan pada tahun 1937, dan dipimpin oleh Ibrahim Muhammad, (Haliadi, 2016: 1-6) sedangkan sekretarisnya adalah Muhammad Yusuf. Ibrahim Muhammad adalah seorang tokoh Muhammadiyah yang cakap dalam memimpin organisasi, dan memiliki pengetahuan tentang Muhammadiyah, karena Beliau seorang lulusan ZUAMA, Sekolah Muballigh Muhammadiyah di Yogyakarta. Pada tahun 1937 juga, Muhammadiyah Cabang Poso telah membentuk organisasi kepanduan yang bernama Hizbul Wathan (HW) yang bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda Islam yang sewaktu-waktu bila diperlukan dapat berjuang secara fisik menentang Belanda. Hizbul wathan dipimpin juga oleh Ibrahim Muhammad. Selain itu juga, terdapat tokoh-tokoh lain dalam organisasi kepanduan binaan muhammadiyah tersebut, seperti Pakaya Podungge, Hosni Mohi, Usma Uda'a, Syukur M. Palengge, dan Ahmad Badudu (haliadi, 2016: 3).

Pada tahun 1970 (33 tahun setelah berdirinya), Muhammadiyah Cabang Poso beralih status menjadi Muhammadiyah Daerah Poso. Pada saat itulah diadakan Musyawarah Daerah (MUSDA) untuk pertama kalinya. Dalam Musda ini diputuskan dua hal penting yaitu memilih Marlam M. Syarif sebagai pimpinan daerah (Ketua Pengurus Daerah) Muhammadiyah Cabang Poso, dan membentuk cabang-cabang Muhammadiyah, yaitu Poso Kota, Tambarana, Lage Timur, Pamona Utara, Pamona Selatan, Bungku Tengah, Bungku Selatan, Ampana, Wakai dan Dolong (Haliadi, 2016: 1-6).

Muhammadiyah juga memiliki beberapa organisasi otonom (Mahfud M. Gamar, 1997: 24) seperti Nasyyatul Aisyiah (NA), Aisyiah, Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Organisasi otonom merupakan badan yang dibentuk dan diawasi oleh perserikatan dan diberi hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri melalui bidang-bidang sesuai kebutuhannya dalam rangka mencapai tujuan perserikatan (organisasi otonom) tersebut. Organisasi otonom merupakan badan yang dibentuk dan diawasi oleh perserikatan dan diberi hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri melalui bidang-bidang sesuai kebutuhannya dalam rangka mencapai tujuan perserikatan (organisasi otonom) tersebut. Organisasi otonom merupakan badan yang dibentuk dan diawasi oleh perserikatan dan diberi hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri melalui bidang-bidang sesuai kebutuhannya dalam rangka mencapai tujuan perserikatan (organisasi otonom) tersebut. Keberadaan Muhammadiyah bersama organisasi otonomnya sangat membantu perkembangan pendidikan Umat Islam di Kota Poso khususnya dan daerah Poso pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh tujuan pendidikan yang dikembangkan Muhammadiyah adalah keseimbangan akal-pikiran dan rahani manusia berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang hakiki. Oleh karena itu, sekolah-sekolah Muhammadiyah berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan ajaran-ajaran dan pendidikan Islam. Menurut Mahfud M. Gamar bahwa tujuan pendidikan yang dicita-citakan Muhammadiyah adalah: 1) Kecerdasan akal dan pikiran; 2) Kesempurnaan kesehatan Jasmani; 3) Kesempurnaan jasmani menurut tuntunan agama Islam; dan 4) Keutamaan budi pekerti yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW (Mahfud M. Gamar, 1997: 24).

## **B. MUHAMMADIYAH DONGGALA**

Menurut Apipah bahwa Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar dan tersebar di wilayah Indonesia yang mana menembus ke seluruh pelosok wilayah Nusantara dan penyebarannya tersebut telah sampai pula di Kabupaten Donggala, khususnya di Kecamatan Banawa. Bahkan juga menembus dunia Islam untuk mendirikan cabang-cabangnya (Apipah, 2016: 33). Masuknya Muhammadiyah pertama kali di Sulawesi, yaitu dipelopori oleh Haji Abdullah. Dia adalah seorang pemuka agama dan terkenal ahli pidato

dalam bahasa Bugis yang tiada tandingannya. Dia adalah seorang Ulama tua yang saleh dan keras kemauannya, serta seorang pemimpin yang penuh tanggung jawab. Beliau amat benci kepada kafir Belanda. Beliau menginginkan berdirinya satu pemerintahan Islam, satu daulat Islam yang merdeka.

Tahun 1928 Masehi, M. Junus Anis diutus pimpinan pusat Muhammadiyah ke Sulawesi. Kemudian atas permintaan Muhammadiyah daerah itu, khususnya K. H. Abdullah. Berdasarkan permintaan tersebut, Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1932 mengutus HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amarullah) ke Sulawesi. Setelah Kongres Muhammadiyah ke-21 tahun 1932 di Makassar (Ujung Pandang), HAMKA bersama keluarganya tinggal di Kota itu untuk mengembangkan Muhammadiyah hingga awal tahun 1932. Semangat Muhammadiyah dan semangat “kaum muda” di Sumatera Barat dikembangkan HAMKA di Makassar (Apipah, 2016: 33). Menurut seorang Informan yang diwawancarai oleh Apipah bahwa masuknya Muhammadiyah di Donggala oleh salah seorang tokoh Muhammadiyah yang berasal dari Sumatera Barat, yaitu Abdul Malik Karim Amarullah. HAMKA pada masa itu termasuk salah seorang pengurus pusat Muhammadiyah, sehingga beliau ditugaskan untuk mengembangkan organisasi tersebut di Sulawesi Tengah, khususnya Donggala. Oleh karena itu, HAMKA disebut-sebut sebagai pelatak dasar keberadaan Muhammadiyah di Donggala. Kedatangan HAMKA ke Donggala pada tahun 1932 menggunakan kapal yang mengangkut barang-barang dagangan untuk dijual di Donggala (Apipah, 2016: 33).

Pada bulan Pebruari 1932, Inisiatif M.B. Lacanda (orang Donggala) Putra seorang Kepala Kampung Donggala melakukan rapat untuk mendirikan Sekolah Muhammadiyah. Pendiri Muhammadiyah di Donggala adalah anggota-anggota SI Lama, disinyalir oleh Belanda bahwa anggotanya adalah “pelaku kerusuhan komunis tahun 1926-1927.” Pada bulan Maret 1932, Achmad Marzoeki (Saudara Lacanda) berangkat ke Makassar melakukan hubungan dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah (Haliadi, 2016: 2); (ANRI, nomor 36).

Muhammadiyah Donggala didirikan pada tanggal 4 Juli 1934. Ketika peresmian organisasi tersebut, Buya Hamka mengundang pemuka-pemuka Muhammadiyah dari Yogyakarta, dan Konsul Muhammadiyah dari Makassar untuk menghadiri peresmian tersebut. Adapun susunan pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Donggala periode tahun 1934-1936, periode 1936-1938, periode 1938-1940, periode 1940-1942, dan membawahi tiga ranting, yaitu: M. B. Lacanda, sedangkan Sekretaris dan Bendaharanya tidak diketahui namanya dengan jelas. Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) terjadi kekosongan pengurus, karena pada waktu itu semua organisasi dilarang oleh pemerintah Jepang (Haliadi, 2016:5). Selama dua periode kepengurusan, yaitu periode 1947-1950 dan periode 1950-1953, Pengurus Cabang Muhammadiyah Donggala dipimpin oleh Labujade sebagai Ketua; Lamanongka sebagai Sekretaris; dan Yahya Yasan sebagai Bendahara. Kemudian, selama lima periode kepengurusan, yakni tahun 1953-1955, periode 1955-1957, periode 1957-1959, periode 1959-1961, dan periode 1961-1962 pengurus cabang dipimpin oleh Lagama Borahima sebagai Ketua, Abdullah Nento sebagai Wakil Ketua; Ahmad Yahya sebagai Sekretaris; bendahara adalah Yahya Yasan, serta Hafid Thalib dan Muhsen Rifai sebagai Anggota. Selama dua periode berikutnya (1964-1966, dan 1966-1968) dipimpin oleh Anwar Jamal (Ketua), Ahmad Yahya (Wakil Ketua), Safri Lamanongka (Sekretaris), Yahya Yasan (Bendahara), dan Ibrahim Pagessa, H. Umar Thalib, serta M. Tahir Lamakarate sebagai anggota (Syamsuddin H. Chalid, tanpa tahun terbit).

Kemudian periode 1968-1983 (1968-1970, 1970-1972, 1972-1974, 1974-1976, 1976-1978, 1978-1980, dan 1980-1983), Muhammadiyah Donggala dipimpin oleh Hafid Thalib sebagai Ketua, Sudiarto sebagai Wakil Ketua, Safri Lamanongka sebagai Sekretaris, Saripuddin sebagai Bendahara, Andi Cella Nurdin dan M. Tahir Lamakarateng sebagai anggota. Dalam periode tahun 1983-1987 serta periode 1987-1991, Muhammadiyah Donggala dipimpin oleh Safri Lamanongka sebagai Ketua, Hatta H. Lebo sebagai Wakil Ketua, Sudiarto sebagai Sekretaris, Saripuddin sebagai Bendahara, Andi Cella Nurdin, M Tahir Lamakarateng, dan H. Umar Thalib sebagai Anggota. Gerakan Muhammadiyah di Donggala umumnya terlihat dari sisi pendidikan yang dimaksudkan untuk mendidik anak-anak pribumi yang tidak mendapatkan kesempatan bersekolah di sekolah-sekolah pemerintah. Sekolah-sekolah tersebut di atas (sekolah Muhammadiyah) pada waktu itu setiap kali pertemuan membimbing muridnya sangat terbatas jumlahnya, yaitu berkisar antara 30-35 orang yang diasuh oleh seorang guru (Haliadi, 2016: 6). Hal ini disebabkan oleh dua kenyataan, yakni jumlah murid yang belajar (dalam setiap pertemuan) tidak tetap jumlahnya. Artinya, keadaan ekonomi keluarga yang tidak mendukung sepenuhnya dan adanya konfrontasi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kedua, pada masa awal berkembangnya Muhammadiyah telah berkembang pula sekolah bersendikan Islam yang dibangun oleh Perguruan Islam Alkhairaat. Pada masa pendudukan Jepang, jumlah murid yang sekolah semakin berkurang, yakni hanya berkisar antara 25-30 orang saja, dan diasuh oleh seorang guru. Tempat belajar biasanya dipusatkan pada sebuah masjid dengan jumlah pendidik sebanyak tiga orang. Pada masa ini, organisasi Muhammadiyah hampir saja bubar. Namun pengurus Muhammadiyah Donggala melakukan dua cara dalam melaksanakan pendidikan, yaitu pendidikan dilaksanakan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi (Apipah, 2016: 40-44).

## **PENUTUP**

Berdasarkan beberapa sumber yang telah dipaparkan tersebut dapat dinyatakan bahwa pendiri Muhammadiyah di Sulawesi Tengah pertama kali diusahakan oleh B.M. Lacanda dan Achmad Marzuki pada bulan Pebruari 1932 di Donggala. Kemudian, pada tanggal 6 Maret 1932 Muhammadiyah didirikan di Wani Lembah Palu. Namun, Organisasi Muhammadiyah Cabang Donggala didirikan secara resmi pada tanggal 4 Juli 1934 oleh Buya Hamka ditemani oleh pemuka-pemuka Muhammadiyah dari Yogyakarta, dan Konsul Muhammadiyah dari Makassar.

Sementara itu, Organisasi Muhammadiyah juga diperkenalkan oleh Raden Imam di rumah seorang peranakan Arab Salim Jibrani di Pagimana pada tanggal 22 Maret 1932. Sementara di Kota Poso mulai diupayakan pendiriannya pada tahun 1935 oleh Tom Oli'i, Ismail Baga (keduanya orang Gorontalo), dan Raden Himmam dari Yogyakarta. Secara resmi Organisasi Muhammadiyah disahkan sebagai Muhammadiyah Cabang Poso didirikan pada tahun 1937 dan dipimpin oleh Ibrahim Muhammad, sedangkan sekretarisnya adalah Muhammad Yusuf.

Berdasarkan catatan awalmula pendirian Muhammadiyah di Sulawesi Tengah direkomendasikan bahwa perlu kiranya meneliti kembali sejarah Muhammadiyah di Sulawesi Tengah untuk dibukukan. Hal ini akan dapat menggambarkan sekaligus menjelaskan proses sejarah Muhammadiyah lokal Sulawesi Tengah yang khas. Sejarah yang unik mengenai Muhammadiyah di Sulawesi Tengah adalah dibangun dan dibentuk oleh tokoh lokal Sulawesi Tengah maupun dari Yogyakarta, Makassar, Minang, Gorontalo, dan Orang Arab yang telah berdomisili di Sulawesi Tengah artinya Muhammadiyah mengakui keragaman dan

memperjuangkan rasa nasionalisme kebangsaan di tingkat lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apipah, "Dinamika Muhammadiyah di Donggala 1934-1991", *Skripsi*, Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNTAD Palu, tidak diterbitkan, 2002.
- Haliadi dan Syamsuri, *Sejarah Islam di Lembah Palu*, Yogyakarta: Q Media, 2015.
- Haliadi, *Sejarah Muhammadiyah di Sulawesi Tengah 1932-1939*, disampaikan pada Diskusi Ba'da Subuh oleh Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Tengah, pada tanggal 26 Juni 2016.
- Herman DM., "Sejarah Pesantren di Indonesia," *Jurnal Al-Ta'dib* Vol. 6 No. 2 Juli - Desember 2013.
- Jan Vansina, *Oral Tradition: A Study in Historical Methodology*, Publisher: Aldine Publishing. Chicago.: Aldine, 1965.
- Latour, Bruno, *Science in action: how to follow scientists and engineers through society*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1987.
- Mahfud M. Gamar, *Peranan Muhammadiyah Terhadap Perkembangan Pendidikan Islam Di Kecamatan Posos Kota (1937-199)* (Skripsi pada Prodi pendidikan Sejarah FKIP UNTAD, 1997.
- Martin Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan 1, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Memory pj. Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah Eddy Djandjang Djajaatmadja*, Palu: Pemda Tk.1 Sulteng, 1979.
- Nurhayati Nainggolan, *Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Tengah*, Jakarta: Depdikbud, 1986/1987.
- Politiek Verslag van Residen Manado over het tweede halfjaar 1932, Bundel MvO 4e, Koleksi ANRI Jakarta.
- "Pengangkatan Guru-Guru Pribumi di Donggala," Besluit, 29 Jun 1908, dalam: Koleksi *Algemeen Secretarie* (1892-1941), Kotak: *Inlanders Hooden en Politieke Bewegingen*, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), nomor: 34.
- Syamsuddin H. Chalid, "Sejarah Perkembangan Muhammadiyah di Sulawesi Tengah". *Manuskrip* tidak diterbitkan.